

BAB II

PENGEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DINIYAH

A. Pengembangan Kurikulum

1. Definisi Kurikulum

Istilah kurikulum menurut Nasution berasal dari bahasa latin “*curriculum*” semula berarti “*a running course, or race course, especially a chariot race course*” dan terdapat pula dalam bahasa Perancis “*courier*” artinya “*to run (berlari)*”.¹ Kemudian istilah itu digunakan untuk sejumlah “*courses*” atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah.²

Seperti halnya dengan istilah-istilah lain yang banyak digunakan, kurikulum juga mengalami perkembangan dan tafsiran yang beragam. Hampir setiap ahli kurikulum mempunyai rumusan sendiri, walaupun di antara berbagai definisi itu terdapat aspek-aspek persamaan.

Secara tradisional, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.³ Pengertian kurikulum yang dianggap tradisional ini masih banyak dianut sampai sekarang, juga di Indonesia. Dalam perkembangan kurikulum sebagai suatu kegiatan pendidikan, timbul berbagai definisi lain. Definisi menentukan apa yang termasuk ke dalam ruang lingkungannya.

Menurut Smith dalam S. Nasution memandang kurikulum sebagai “*a sequence of potential experience of disciplining children and youth in group ways of thinking and acting*”.⁴ Dalam definisi ini lebih luas karena tidak hanya sekedar meliputi mata pelajaran, dan tampak jelas bahwa Smith menekankan pada aspek sosial, yakni mendidik anak menjadi anggota masyarakat.

¹ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 9

³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴ *Ibid.*, hlm. 10

Sejalan dengan itu, Saylor dan Alexander dalam S. Nasution juga merumuskan kurikulum sebagai “*the total effort of the school to going about desired outcomes in school and out-of-school situations*”.⁵ Definisi ini juga luas kerana meliputi segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu kurikulum tidak hanya mengenai situasi di ddalam sekolah tetapi juga di luar sekolah.

Sedangkan Harold Albery dan John Kerr, dalam Nasution mengemukakan definisi yang cenderung mirip, yaitu “*the currriculum of a school is all the experiences that pupils have under the guidance of the school*” yaitu segala pengalaman anak di sekolah di bawah bimbingan sekolah.⁶

Hilda Taba menekankan bahwa definisi kurikulum hendaknya jangan terlampau luas sehingga menjadi kabur dan tak-fungsional. Ia berpendirian bahwa kurikulum adalah “*a plan for learning*”.⁷ Pengembang kurikulum harus tahu tujuan apa yang dapat tercapai dalam kondisi yang bagaimana, sehingga tercapai proses belajar yang efektif.

Sedangkan Oemar Hamalik mengemukakan sebagai berikut:

Kurikulum merupakan rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu.⁸

Sedangkan Nur Ahid juga berpendapat bahwa kurikulum adalah sebagai berikut:

Seperangkat materi pelajaran yang harus dilalui siswa atau rencana belajar siswa di bawah tanggung jawab guru atau sekolah untuk mencapai suatu jenjang atau ijazah, maka kurikulum hendaknya

⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁷ *bid.*, hlm. 10.

⁸ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 91.

disusun secara sistematis dan logis, agar dapat tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang ditetapkan.⁹

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁰

Berdasarkan sejumlah definisi di atas dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah sebuah alat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi atau bahan ajar, proses belajar mengajar dan evaluasi.

a. Komponen-Komponen Kurikulum

Kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme manusia atau pun binatang, yang memiliki susunan anatomi tertentu. Menurut Nasution komponen-komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah sebagai berikut: 1) Tujuan; 2) Bahan pelajaran yang tersusun sistematis; 3) Proses belajar mengajar; 4) Evaluasi atau penilaian, untuk mengetahui sejauh mana tujuan tercapai¹¹

Tiap komponen saling bertalian erat dengan semua komponen lainnya. Jadi tujuan bertalian erat dengan bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian atau evaluasi. Artinya tujuan yang berlainan, kognitif, afektif, atau psikomotor akan mempunyai bahan pelajaran yang berlainan, proses belajar mengajar juga berbeda, dan harus dinilai dengan cara yang lain pula.

⁹ Nur Ahid, *Problematika Madrasah Aliyah di Indonesia*, STAIN Kediri Press, Kediri, 2009, hlm. 105.

¹⁰ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab I, Pasal 1, ayat 19.

¹¹ S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 5.

b. Konsep-Konsep Kurikulum

John D. Neil dalam Nur Ahid mengemukakan bahwa konsep kurikulum ada empat macam yaitu kurikulum akademik, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologi.¹²

1) Kurikulum Akademik

Kurikulum akademis ini merupakan model yang pertama dan tertua, sejak sekolah berdiri, kurikulumnya seperti ini, bahkan sampai sekarang walaupun telah berkembang tipe-tipe lain, umumnya sekolah tidak dapat melepaskan tipe ini. Karena sangat praktis, mudah disusun dan mudah digabungkan dengan tipe-tipe lain.

Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan bahwa:

Kurikulum akademis bersumber dari pendidikan klasik (*perennialisme*) dan (*esensialisme*) yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru.¹³

Guru di sini adalah sebagai penyampai bahan ajar yang memegang peranan penting. Mereka harus menguasai semua pengetahuan yang ada dalam kurikulum. Ia harus menjadi ahli dalam bidang-bidang studi yang diajarkan. Lebih jauh guru dituntut bukan hanya menguasai materi pendidikan, tetapi ia juga menjadi model bagi para siswanya. Apa yang disampaikan dan cara penyampaiannya harus menjadi bagian dari pribadi guru. Guru adalah yang *digugu* dan *ditiru* (ucapan dan perilakunya dapat dicontoh).

¹² Nur Ahid, *Op. Cit.*, hlm. 105.

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 81.

Sejalan dengan itu, S. Nasution juga mengemukakan sebagai berikut:

Masalah yang dihadapi dalam menjalankan kurikulum akademik ialah antara lain kriteria memilih disiplin ilmu yang akan diajarkan di sekolah dari sebanyak kira-kira 1000 macam disiplin atau cabang disiplin. Apakah yang dipakai sebagai kriteria, apakah berdasarkan hal-hal yang terkandung dalam disiplin itu sendiri, misalnya bahwa suatu matapelajaran harus dipelajari sebagai syarat untuk matapelajaran lain, ataukah karena kegunaannya bagi kehidupan dalam masyarakat? Salah satu pegangan yang hingga kini masih dipakai ialah untuk memenuhi syarat bagi kelanjutan pelajaran di Perguruan Tinggi.¹⁴

2) Kurikulum Humanistik

Menurut Nur Ahid, mengatakan bahwa para humanisme berpandangan bahwa kurikulum adalah:

Sesuatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses yang mampu memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai integrasi perkembangan dalam menuju aktualisasi (perwujudan) diri. Kurikulum humanistik bertolak dari asumsi bahwa anak adalah pertama dan utama dalam pendidikan. Anak adalah pertama dan utama dalam pendidikan. Anak adalah subjek yang menjadi sentral aktivitas pendidikan. Anak memiliki sejumlah potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang sendiri.¹⁵

Jadi pada intinya para pendidik humanis menganggap bahwa anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan pada pembinaan yang utuh, bukan pada aspek fisik atau intelektual belaka, melainkan juga pada segi afektif (emosi, perasaan, nilai, dan sejenisnya).

Mereka juga berpandangan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab. Berkat situasi tersebut anak mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.

¹⁴ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, Op. Cit., hlm. 29.

¹⁵ Nur Ahid, *Op. Cit.*, hlm. 108-109.

Mc Neil dalam Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan “*The new humanists are self actualizers who see curriculum as a liberating process that can meet the need for growth and personal integrity*”.¹⁶ Tugas guru adalah menciptakan situasi yang permisif dan mendorong siswa untuk mencari dan mengembangkan pemecahan sendiri.¹⁷

S. Nasution juga berpendapat bahwa konsep kurikulum yang humanistik ini memindahkan titik berat pendidikan dari bahan pelajaran kepada anak sebagai individu keseluruhan.¹⁸ Untuk itu diusahakan integrasi antara aspek afektif (perasaan, sikap, nilai-nilai) dengan aspek kognitif (pengetahuan dan kemampuan intelektual), sehingga apa yang dipelajari mempunyai makna pribadi bagi anak.¹⁹ Maka karena itu diberi lebih banyak diberi kesempatan kepada anak untuk memilih dari berbagai alternatif sesuai dengan maknanya bagi kehidupannya dengan bertanggung jawab atas pilihannya itu.

3) Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerja sama.²⁰

Interaksi atau kerja sama yang dimaksud dapat terjadi pada siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan orang di lingkungannya. Dengan kerja sama semacam ini, para siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat agar terjadi masyarakat yang lebih baik.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit.*, hlm. 86-87.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 86-87.

¹⁸ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum, Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁰ Nur Ahid., *Op. Cit.*, hlm. 112.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Dewey dalam S. Nasution bahwa pendidikan dipandang sebagai alat rekonstruksi sosial yang paling efektif. Dengan membentuk individu dapat dibentuk masyarakat. Pendidikan merupakan badan yang konstruktif untuk memperbaiki masyarakat dan membina masa depan yang lebih baik.²¹

Nasution juga mengemukakan bahwa:

Kurikulum sebagai rekonstruksi sosial mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. Tujuannya ialah perubahan sosial atas tanggung jawab tentang masa depan masyarakat. Tugas kurikulum demikian bukanlah sesuatu yang baru akan tetapi selalu merupakan suatu bagian dari fungsi pendidikan, karena pendidikan selalu berkaitan tujuannya dengan masa mendatang. Hingga manakah tanggung jawab itu berbeda-beda menurut pendapat pendidik tertentu. Sekolah biasanya dipandang sebagai “*agent of social change*”, badan untuk mengadakan sebuah perubahan sosial. Sekolah merupakan jembatan antara masa kini dengan masa mendatang, antara realitas masa kini dengan ideal atau cita-cita untuk masa mendatang.²²

Sehubungan dengan itu, Theodore Brameld dalam Nana Syaodih Sukmadinata, pada awal tahun 1950-an juga menyampaikan gagasannya tentang rekonstruksi sosial:

Dalam masyarakat demokratis, seluruh warga masyarakat harus turut serta dalam perkembangan dan pembaharuan masyarakat. Untuk melaksanakan hal itu sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja dapat membantu individu memperkembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial.²³

Para rekonstruksionis sosial tidak mau terlalu menekankan kebebasan individu. Mereka ingin meyakinkan murid-murid bagaimana masyarakat membuat warganya seperti yang ada

²¹ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum, Op. Cit.*, hlm. 23.

²² *Ibid.*, hlm. 24.

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit.*, hlm. 92.

sekarang dan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi warganya melalui konsensus sosial.²⁴

Brameld juga ingin memberikan keyakinan tentang pentingnya perubahan sosial:

Perubahan sosial tersebut harus dicapai melalui prosedur demokrasi. Para rekonstruksionis menentang intimidasi, menakut-nakuti dan kompromi semu. Mereka mendorong agar para siswa mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak (*crucial*) dan kerja sama atau bergotong royong untuk memecahkannya.²⁵

Jadi pada intinya, konsepsi kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan agar para siswa mampu bersosial dan bermasyarakat dengan baik. Tentang bagaimana berkomunikasi, berinteraksi atau timbal balik antar sesama manusia dengan baik. Karena sejatinya segala kegiatan yang terjadi dalam proses pembelajaran merupakan proses kerjasama atau interaksi, yaitu interaksi antara murid dengan guru, interaksi murid dengan murid dan interaksi antara guru dengan guru. Dengan begitu, setelah siswa keluar dari lingkungan sekolah, diharapkan siswa mampu bersosial dengan baik.

4) Kurikulum Teknologi

Menurut Nur Ahid, mengemukakan bahwa kurikulum teknologi berpandangan bahwa:

Kurikulum merupakan proses untuk menghasilkan tuntutan kebutuhan-kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya kurikulum meliputi dua bentuk; yakni, bentuk perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*).²⁶

Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi

²⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 92.

²⁶ Nur Ahid, *Op. Cit.*, hlm. 114.

perangkat lunak disebut juga teknologi sistem (*system technology*).²⁷

Sejalan dengan itu, S. Nasution mengemukakan bahwa:

Selama ini mengajar dianggap masih terlampau banyak bercorak *seni* dan sangat ditentukan oleh keterampilan dan kepribadian masing-masing guru. Apa yang dilakukan dengan sukses oleh seorang guru belum tentu dapat diulangi atau ditiru guru lain dengan hasil yang sama. Teknologi pendidikan berusaha agar teknik mengajar ini dapat dikuasai sepenuhnya sehingga dapat dijamin hasil yang sama lepas dari faktor kepribadian guru atau murid. Teknologi pendidikan bermaksud memberikan dasar *ilmiah* dan *empiris* kepada proses belajar mengajar.²⁸

Kemudian S. Nasution juga menambahkan:

Untuk itu teknologi pendidikan memberikan prosedur tertentu yang dapat dilakukan oleh siapapun. Prosedur itu didasarkan pada ilmu kelakuan, khususnya teori behaviorisme dengan teori stimulus-responnya. Siswa harus merespon terhadap stimulus tertentu. Hasilnya segera diberitahukan. Jika betul maka dibenarkan dan ini merupakan *reinforcement* yang memperkuat hubungan antara stimulus dan respons atau antara pertanyaan dan jawaban. Bila salah maka segera diberikan perbaikan atau *feedback* sehingga dapat tercapai respons yang tepat secara tuntas menjadi *mastery learning*.²⁹

Jadi inti dari kurikulum teknologi ialah pada penggunaan teknologi yang dipadukan dan diintegrasikan dengan kurikulum yang akan dijalankan di suatu lembaga pendidikan, yang bertujuan untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Dan dengan harapan supaya proses pembelajaran menjadi lebih baik.

2. Pengembangan Kurikulum

Oemar Hamalik dalam *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* mengemukakan bahwa:

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

²⁸ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum, Op. Cit.*, hlm. 19.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar-mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk memudahkan proses belajar mengajar.³⁰

Audrey Nicholls & S. Howard Nicholls dalam Oemar Hamalik mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum (*curriculum development*) adalah: “*the planning of learning opportunities intended to bring about certain desired in pupils, and assessment of the extent to which these changes have taken place*”.³¹

Selanjutnya Oemar Hamalik menjelaskan sebagai berikut:

Rumusan di atas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Sedangkan yang dimaksud kesempatan belajar (*learning opportunity*) adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa, guru, bahan peralatan, dan lingkungan di mana belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Ini terjadi bahwa semua kesempatan belajar direncanakan oleh guru, bagi para siswa sesungguhnya adalah “kurikulum itu sendiri”.³²

Jadi yang dimaksud pengembangan kurikulum ialah sebuah pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum itu bisa berupa penambahan, dan bisa juga berupa pengurangan dari kurikulum lama yang sudah diterapkan sebelumnya. Dengan tujuan supaya proses pendidikan berlangsung lebih baik, dan mampu mencetak *out put* yang yang bagus.

a. Landasan-Landasan Pengembangan Kurikulum

Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, penyusunan kurikulum tidak dapat dikerjakan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum

³⁰ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 183.

³¹

³² Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, *Op. Cit.*, hlm. 96.

membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam.³³ Kalau landasan pembuatan sebuah gedung tidak kokoh, yang akan ambruk adalah gedung tersebut, tetapi kalau landasan pendidikan, khususnya kurikulum yang lemah, maka yang akan “ambruk” adalah manusianya.³⁴

Menurut James A. Beane dalam Abdullah Aly mengemukakan bahwa ada tiga dasar atau landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis.³⁵

1) Landasan Filosofis

Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan bahwa:

Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan terdidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam interaksi tersebut terlibat isi yang diinteraksikan serta proses bagaimana interaksi tersebut berlangsung. Apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapakah pendidik dan terdidik, apa isi pendidikan dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang mendasar, yang esensial yaitu jawaban-jawaban filosofis. Secara harfiah filosofis (filsafat) berarti “cinta akan kebijakan” (*love of wisdom*). Orang belajar befilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti dan berbuat secara bijak, ia harus tahu atau berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam.³⁶

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata, Abdullah Aly juga mengungkapkan sebagai berikut:

Menurut beberapa rujukan ditemukan delapan aliran filsafat yang memiliki pemikiran tentang pendidikan, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme,

³³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit.*, hlm. 38

³⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁵ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren (Telaah terhadap kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 43.

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit.*, hlm. 38.

progresivisme, perenialisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Keberadaan kedelapan aliran filsafat di atas menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan tidak ada keseragaman pemikiran tentang aspek-aspek yang terdapat dalam pendidikan. Hal ini berarti bahwa aliran filsafat yang dianut oleh seseorang berdampak pada cara pandangnya, misalnya, tentang peserta didik, tujuan pendidikan, dan pentingnya keragaman aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, kurikulum suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh aliran filsafat yang dianut para pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum.³⁷

Jadi pada intinya, landasan filosofis merupakan landasan di mana kurikulum pendidikan berpijak dari pemikiran-pemikiran para filsuf zaman dahulu yang ada kaitannya dengan pendidikan, atau lebih dikenal dengan filsafat pendidikan. Karena inti dari pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, yang mana manusia sendiri adalah salah satu dari objek kajian filsafat.

2) Landasan Psikologis

Dasar psikologis di sini dipahami bahwa dalam pengembangan kurikulum diperlukan pertimbangan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar peserta didik (*basic human needs*).³⁸ Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, dasar psikologis ini penting diperhatikan karena dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu manusia, yaitu antara peserta didik dengan guru dan juga antara peserta didik dengan orang-orang lainnya.³⁹

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa:

Kondisi psikologis setiap peserta didik berbeda, karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial budaya, dan perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Karena itu, menurutnya, interaksi yang tercipta dalam situasi pendidikan harus sesuai dengan kondisi psikologis peserta didik maupun kondisi gurunya. Interaksi peserta didik dengan guru pada jenjang sekolah

³⁷ Abdullah Aly, *Op. Cit.*, hlm. 43-44.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit.*, hlm. 45.

dasar berbeda dengan jenjang sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas.⁴⁰

Jadi berdasarkan konsepsi ini, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Tugas utama yang sesungguhnya dari para pendidik adalah membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Sedangkan pendidik atau guru melakukan berbagai upaya, dan menciptakan berbagai kegiatan dengan dukungan berbagai alat bantu pengajaran agar anak-anak belajar. Cara belajar mana yang dapat memberikan hasil yang optimal dan bagaimana proses pelaksanaannya.

Nana Syaodih juga mengemukakan sebagai berikut:

Minimal ada dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu Psikologi Perkembangan dan Psikologi Belajar. Keduanya sangat diperlukan, baik di dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, memilih dan menerapkan metode pembelajaran serta teknik-teknik penilaian.⁴¹

3) Landasan Sosiologis

Abdullah Aly berpendapat bahwa:

Selama ini, sosiologi sering dipahami sebagai kajian tentang masyarakat dan isu-isu sosial dulu, kini, dan masa yang akan datang. Ditemukan beberapa hal yang merupakan hasil kajian sosiologi yang memiliki kaitan dengan pendidikan. Beberapa hal yang dimaksud adalah perkembangan teknologi, struktur keluarga, perkembangan masyarakat, keragaman kultural dan pluralisme, serta nilai-nilai gaya hidup yang berubah.⁴²

Mengingat hal-hal tersebut memiliki kaitan dengan pendidikan, maka hal-hal tersebut juga harus dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga kurikulum yang dikembangkan memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat.

⁴⁰ Abdullah Aly, *Op. Cit.*, hlm. 57-58.

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit.*, hlm. 45-46.

⁴² Abdullah Aly, *Op. Cit.*, hlm. 53.

Teknologi sebagai salah satu produk sains dan ilmu pengetahuan, memiliki dampak yang sangat positif bagi kehidupan manusia. Ia dapat mempermudah kebutuhan dan kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan pendidikan.⁴³ Selain perkembangan teknologi, struktur keluarga dewasa ini juga perlu diperhatikan. Keluarga yang merupakan bagian inti dari masyarakat belakangan ini mengalami perubahan struktur.⁴⁴

Berdasarkan realita di masyarakat, selama ini keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak; kini tidak sedikit keluarga inti hanya terdiri anak dan ibu atau anak dan ayah, karena faktor perceraian atau faktor tempat pekerjaan. Fenomena ini mengharuskan anak tumbuh bersama ibunya saja, atau hanya bersama ayahnya. Pada kasus tertentu anak tumbuh bersama neneknya. Perubahan struktur keluarga ini berimplikasi pada perubahan peran orang tua dalam pendidikan anak.

Selanjutnya Abdullah Aly juga menambahkan:

Keragaman kultural dan pluralisme juga harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Selain itu fenomena perubahan nilai gaya hidup juga harus diperhatikan. Dalam memerhatikan fenomena tersebut, perancang kurikulum harus menentukan program-program yang dapat memenuhi gaya hidup atau bahkan meluruskan gaya hidup yang berkembang di masyarakat.⁴⁵

Jadi pada intinya, landasan sosiologis merupakan landasan yang bertumpu pada realitas yang ada di masyarakat, di sekitar lingkungan lembaga pendidikan. Yang mana realitas masyarakat merupakan suatu hal yang kompleks. Mulai dari kemajuan teknologi yang semakin berkembang, perubahan struktur keluarga, budaya di lingkungan sekitar yang beragam, keragaman agama di lingkungan sekitar, keragaman suku dan ras, perubahan nilai gaya

⁴³ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 56-57.

hidup dan sebagainya. Sehingga para pengembang kurikulum hendaknya memperhatikan aspek-aspek yang ada di masyarakat tersebut, sehingga kurikulum menjadi tepat guna dan sinkron dengan realitas masyarakat.

b. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum

Nana Syaodih Sukmadinata dalam *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, membagi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus.⁴⁶

1) Prinsip-prinsip Umum

Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

Pertama adalah prinsip *relevansi*. Ada dua macam relevansi yaitu relevansi ke luar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri.⁴⁷ Relevansi ke luar maksudnya tujuan, isi, proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian.

Prinsip kedua adalah *fleksibilitas*, kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel.⁴⁸ Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan, dan latar belakang anak.

Prinsip ketiga adalah *kontinuitas* yaitu kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti.⁴⁹ Oleh

⁴⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit.*, hlm. 150.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 150.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 150.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 151.

karena itu pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas, dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan serempak bersama-sama, perlu selalu ada komunikasi dan kerjasama antara para pengembang kurikulum sekolah dasar dengan SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

Prinsip Keempat adalah *praktis*, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah.⁵⁰ Kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan hanya harus ideal tapi juga praktis.

Prinsip kelima adalah *efektivitas*. Walaupun kurikulum tersebut harus murah, sederhana, dan mudah tapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara kuantitas maupun kualitas.⁵¹

2) Prinsip-prinsip Khusus

Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum. Prinsip ini berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian.

a) Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran dalam *Kurikulum dan Pelajaran* bahwa:

Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan jangka panjang (tujuan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 151.

umum), jangka menengah, dan jangka pendek (tujuan khusus).⁵²

b) Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran dalam *Kurikulum dan Pelajaran* juga mengungkapkan bahwa:

Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Perlu penjabaran tujuan pendidikan/pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana.
- 2) Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- 3) Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis.⁵³

c) Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran dalam *Kurikulum dan Pelajaran*, mengungkapkan bahwa:

Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperoleh hal-hal sebagai berikut:

- (1) Apakah metode/teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran?
- (2) Apakah metode/teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi hingga dapat melayani perbedaan individual siswa?
- (3) Apakah metode/teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat?
- (4) Apakah metode/teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor?
- (5) Apakah metode/teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa, mengaktifkan guru, atau kedua-duanya?
- (6) Apakah metode/teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, juga mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah dan di masyarakat?

⁵² Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pelajaran*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 72.

(7) Untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan “*learning by doing*” di samping “*learning by seeing and knowing*”.⁵⁴

d) Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian

Nana Syaodih Sukmadinata dalam *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, mengemukakan bahwa:

Penilaian merupakan bagian integral dalam pengajaran:

(1) Dalam penyusunan alat penilaian (*test*) hendaknya mengikutai langkah-langkah sebagai berikut:

Merumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang umum, dalam ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Menguraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Menghubungkan dengan bahan pelajaran. Menulis butir-butir test.

(2) Dalam merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan beberapa hal:

Bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan di test? Berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan test? Apakah test tersebut berbentuk uraian atau objektif? Berapa banyak butir test perlu disusun? Apakah test tersebut diadministrasikan oleh guru atau oleh murid?

(3) Dalam pengolahan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan hal sebagai berikut:

*Norma apa yang digunakan dalam pengolahan hasil test? Apakah digunakan formula quessing? Bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masak? Skor standar apa yang digunakan? Untuk apakah hasil-hasil test digunakan?*⁵⁵

B. Madrasah Diniyah

1. Defnisi Madrasah

Madrasah berasal dari akar kata *darasa* (belajar), dan kata madrasah adalah “*isim makan*” yang mempunyai arti tempat belajar.⁵⁶ Sedangkan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah agama Islam. Dalam *Shorter*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

⁵⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit.*, hlm. 154.

⁵⁶ Nur Ahid, *Op. Cit.*, hlm. 22.

Encyclopedia of Islam, diartikan “*Name of on institution where the Islamic science are studied*”.⁵⁷ Madrasah sebutan bagi sekolah agama Islam adalah tempat proses belajar mengajar ajaran Islam secara formal yang mempunyai kelas dan kurikulum dalam bentuk klasikal. Sedangkan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah.⁵⁸

Malik Fadjar dalam Khoiriyah mengemukakan juga bahwa kata madrasah berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti atau semakna dengan sekolah dalam bahasa Indonesia. Kata sekolah pun juga berasal dari bahasa asing *school* atau *scola*.⁵⁹ Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pendidikan.

Malik Fajar dalam Khoiriyah menambahkan sebagai berikut:

Madrasah menngambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik. Di lembaga ini, anak didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk beluk agama dan keagamaan. Kata madrasah yang secara harfiah identik dengan sekolah agama, setelah mengarungi perjalanan peradaban bangsa diakui telah mengalami perubahan-perubahan walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan budayanya yaitu budaya Islam.⁶⁰

Maksud madrasah, dalam SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar sekurang-kurangnya 30 %, di samping mata pelajaran umum.⁶¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah mengakui keberadaan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dan berdasarkan PP No. 28 dan 29 tahun 1989 ditetapkan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

⁵⁹ Khoiriyah, *Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam*, Teras, Yogyakarta, 2014, hlm. 185.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 186.

⁶¹ Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/U/1975, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1975.

khas Islam dan kurikulum madrasah adalah sama dengan kurikulum sekolah plus ciri khasnya.⁶²

Khoiriyah mengemukakan sebagai berikut:

Sebagaimana dalam proses belajar mengajar secara formal, madrasah hampir mirip dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni “sekolah agama”, tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk beluk agama dan keagamaan (dalam hal ini agama Islam).⁶³

Khoiriyah juga menambahkan sebagai berikut:

Madrasah adalah bentuk perkembangan dalam model pendidikan Islam tradisional di Indonesia, yaitu pesantren. Dewasa ini, madrasah berdiri berdampingan dengan sistem persekolahan yang lain. Sebagian besar organisasi madrasah disusun serupa dengan organisasi persekolahan. Secara bertingkat ada MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah). Komponen mata pelajaran agama meliputi al-Qur'an, hadits, fiqih, akidah, akhlak, sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab. Termasuk juga komponen mata pelajaran eksakta maupun non eksakta.⁶⁴

Sejalan dengan itu, Moh. Roqib juga mengemukakan sebagai berikut:

Berdasarkan sejarahnya, perkembangan madrasah dan lembaga pendidikan Islam lain boleh dikatakan termarginalkan oleh kebijakan umum sistem pendidikan nasional, meskipun akhir-akhir ini telah ada upaya yang cukup signifikan untuk menempatkan pendidikan Islam sebagai pendidikan alternatif yang menjadi rujukan dan model bagi pendidikan lain di Nusantara.⁶⁵

Sedangkan Abdurrachman Mas'ud dkk., dalam *Dinamika Pesantren Dan Madrasah* juga mengemukakan sebagai berikut:

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat

⁶² Nur Ahid, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁶³ Khoiriyah, *Op. Cit.*, hlm. 184.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 186.

⁶⁵ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, LKis, Yogyakarta, 2009, hlm. 134.

beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya.⁶⁶

Jadi pada intinya, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang dalam proses pembelajarannya mengajarkan tentang seluk beluk agama Islam. Di Madrasah pendidikan agama Islam diajarkan lebih rinci dibandingkan dengan sekolah umum. Yang mana madrasah di madrasah terdapat mata pelajaran seperti Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

2. Karakteristik Madrasah

Karakteristik Madrasah adalah ciri khas yang melekat pada madrasah yang merupakan kekuatan dari madrasah itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhaimin dalam Khoiriyah bahwa karakteristik madrasah adalah sebagai berikut:

a. Madrasah milik masyarakat (*Community Base Education*)

Muhaimin dalam khoiriyah mengatakan bahwa:

Madrasah tumbuh dan berkembang dari masyarakat dan untuk masyarakat, karena itu dari segi kuantitas berkembang sangat pesat, namun dari segi kualitas perkembangannya sangat lamban. Ini konsekuensi madrasah yang bersifat populis/massif yang selalu cenderung memekar dan belum sempat mendalam. Ketertarikan masyarakat terhadap madrasah lebih dinampakkan sebagai ikatan emosional keagamaan yang tinggi. Ikatan ini muncul karena bertemunya dua kepentingan. Pertama, hasrat kuat masyarakat Islam untuk berperan serta dalam pendidikan, dan kedua motivasi keagamaan untuk *ber-tafaqquh fi al-din*.⁶⁷

b. Madrasah menerapkan manajemen berbasis sekolah (*school based management*)

Muhaimin dalam Khoiriyah juga mengatakan bahwa:

Konsep manajemen berbasis sekolah (*school based management*) merupakan konsep manajemen sekolah yang memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab yang luas bagi

⁶⁶ Abdurrachman Mas'ud dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 227.

⁶⁷ Khoiriyah, *Op. Cit.*, hlm. 190.

sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah, mencari dan mengembangkan serta mendayagunakan sumber daya pendidikan yang tersedia, dan memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

Madrasah sejak awal berdirinya didasari *school based management*. Keberanian sekolah menentukan jenis keunggulan apa dari madrasah dan ciri khas apa yang membedakan dengan madrasah/sekolah lain ditonjolkan oleh sekolah yang bersangkutan. Keragaman dan ketidaktergantungan dengan pusat dan birokrasi telah membuat madrasah pada masa lalu banyak yang bergengsi.⁶⁸

c. Madrasah sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din*

Muhaimin dalam Khoiriyah juga menambahkan bahwa:

Konsep dasar dari madrasah adalah untuk memberikan kesempatan pada peserta didik mempelajari, mengamalkan, memahami dan mendalami agama sebagai kewajiban dari setiap individu. Kemudian mengajarkan ilmu yang didapatnya kepada orang lain walaupun hanya sedikit. Ini pulalah yang menyebabkan madrasah tidak dapat dipisahkan dari tugas dakwah dan selalu dihadapkan pada pendekatan kuantitatif ataukah pada pendekatan kualitatif. Di satu pihak sebagai madrasah harus mengutamakan kualitas dan sebagai lembaga agama harus juga melakukan pendekatan kuantitas.⁶⁹

d. Madrasah sebagai lembaga kaderisasi dan mobilitas umat

Muhaimin dalam Khoiriyah juga menambahkan bahwa:

Madrasah merupakan wadah berkumpul dan belajar para calon pemimpin umat. Ini juga yang membuat pemerintah colonial Belanda memberi perhatian khusus dengan lembaga pendidikan Islam sehingga perlu mengeluarkan ordonasi sekolah liar (*wild scolelen ordonantie*) pada tahun 1905 dan diperluas dengan ordonasi tahun 1925. Dari lulusan lembaga pendidikan Islam inilah banyak lahir para tokoh Islam terkenal dengan sebutan kyai, ajengan, buya, syeikh, ulama, ustadz, maupun para birokrat, politikus dan pemimpin-pemimpin Islam yang memiliki posisi penting sebagai pemimpin informal dalam kehidupan keagamaan di masyarakat.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 191.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 192.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 192.

3. Definisi Madrasah Diniyah

Abdurrachman Mas'ud dkk., dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah* mengemukakan bahwa:

Menurut perkembangan saat ini, terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Sedangkan di sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasikal yang kemudian dikenal dengan *madrasah diniyah*.⁷¹

Berdasarkan sistem pendidikan Nasional, Madrasah Diniyah termasuk dalam kategori pendidikan keagamaan. Sedangkan pendidikan keagamaan menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 adalah:

Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.⁷²

Jadi bisa dikatakan bahwa madrasah diniyah merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan swasta, yang di dalamnya diajarkan mengenai perihal dan seluk-beluk agama Islam saja, dan tidak diajarkan perihal mengenai ilmu umum. Dan sistem pengajarannya biasanya adalah secara klasikal.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dari penulis dan mendeskripsikan beberapa penelitian yang isinya relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Hanif (2010), mahasiswa STAIN Kudus, dengan judul “Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal di

⁷¹ Abdurrachman Mas'ud, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 227.

⁷² Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab VI, Bagian Kesembilan, Pasal 30 ayat 1 dan 2.

Pondok Pesantren Futuhiyah Mranggen Demak”. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitiannya pada muatan lokalnya saja sehingga penelitian ini tidak meneliti kurikulum secara keseluruhan.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Said Asyari (2011), mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Implementasi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dalam Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan”. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai implementasi atau penerapan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum madrasah diniyah, kurikulum madrasah diniyah dan metode pembelajaran yang digunakan di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, juga dijelaskan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum.
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Laila Zakiyatus Sholihah (2007), mahasiswi UIN Malang, dengan judul “Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama di Madrasah Diniyah (MDNH) Pondok Pesantren Nurul Huda Mergonoso Malang”. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah dalam beberapa sektor yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum serta fleksibilitas kebutuhan santri dan masyarakat. Dan juga dijelaskan mengenai faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan agama.

Setelah membaca dari ketiga penelitian terdahulu di atas, maka penulis mendapatkan ide dari penelitian yang mereka lakukan, mengenai pelaksanaan pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Studi Analisis Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah (Studi Kasus di Madrasah Diniyah *Ula* dan *Wustho* Matholi’ul Huda Troso Pecangaan Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017)”.

Tiga penelitian yang dilakukan di atas, cukup berbeda namun tetap ada kesinambungan atau mempunyai kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, di mana fokus penelitiannya adalah pengembangan kurikulum. Pada penelitian pertama, membahas tentang pengembangan kurikulum muatan lokal di Pondok Pesantren. Kemudian pada penelitian kedua, membahas tentang implementasi Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah. Sedangkan pada penelitian ketiga, membahas tentang upaya pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama. Jadi sudah jelas kiranya bahwa ketiga penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah pada fokus penelitian yaitu pengembangan kurikulum.

Sedangkan perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama berusaha mengurai dan menganalisis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal di Pondok Pesantren, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berusaha mengurai dan menganalisis tentang pengembangan kurikulum yang dilakukan di Madrasah Diniyah. Sehingga jelas bahwa perbedaan antara penelitian pertama dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokus penelitian dan fokus penelitian yang mana penelitian pertama hanya memfokuskan pada muatan lokalnya saja, sedang peneliti yang akan dilakukan membahas kurikulum secara keseluruhan.

Penelitian kedua berusaha mengurai dan menjelaskan bagaimana implementasi atau penerapan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah berusaha menguraikan dan menganalisa pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah. Jadi jelas bahwa perbedaannya adalah pada fokus penelitian. Penelitian kedua tertuju pada bagaimana implementasi dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pengembangan kurikulum, sedangkan

penelitian yang akan peneliti lakukan tertuju pada bagaimana pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyah.

Penelitian ketiga berusaha mengurai dan menjelaskan pelaksanaan pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama di Madrasah Diniyah, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan berusaha mengurai dan menjelaskan bagaimana pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah. Penelitian ketiga fokus penelitiannya hampir mirip dengan penelitian yang akan penelitian lakukan, karena sama-sama tertuju pada pengembangan kurikulum. Namun pada penelitian ketiga terdapat penambahan variabel yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu mutu pendidikan agama. Sehingga penelitian ketiga menjelaskan bagaimana pengembangan kurikulum madrasah diniyah dan implikasinya terhadap mutu pendidikan agama di Madrasah Diniyah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan hanya menjelaskan bagaimana pengembangan kurikulum di Madrasah Diniyah.

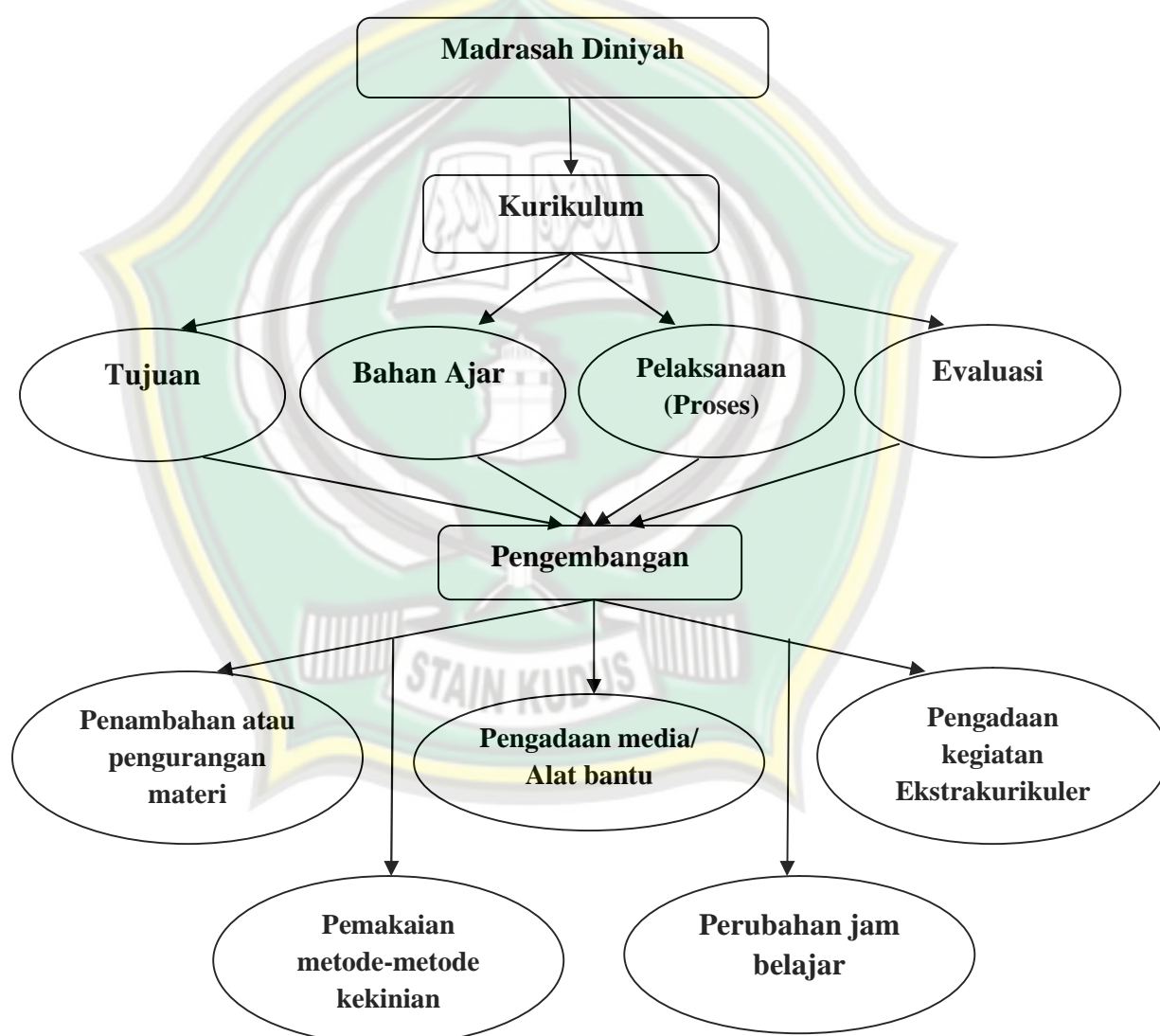
D. Kerangka Bepikir

Madrasah Diniyah merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan sebuah kegiatan pendidikan. Dalam prakteknya sebuah lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan, pasti mempunyai sebuah acuan sebagai pengatur arah dalam menjalankan roda pendidikan yaitu yang disebut dengan kurikulum.

Kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme manusia ataupun binatang, yang memiliki susunan anatomi tertentu. Komponen-komponen dari anatomi tubuh kurikulum tersebut adalah tujuan, bahan ajar (isi), proses pembelajaran (pelaksanaan), dan evaluasi; dan komponen-komponen tersebut juga memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan perkembangannya, kurikulum juga perlu adanya sebuah pengembangan supaya memperoleh hasil pembelajaran yang ideal. Ideal yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan tujuan kompetensi yang diharapkan. Adapun contoh dari beberapa pengembangan kurikulum adalah penambahan atau pengurangan materi, pengadaan media/alat bantu, pengadaan kegiatan ekstrakurikuler, pemakaian metode-metode kekinian, perubahan jam belajar, dan lain-lain. Kerangka berpikir penulis, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir